

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA DAN KABUPATEN DI PULAU KALIMANTAN

**Ida Mentayani
Rusmanto**

Prodi Akuntansi, STIE Nasional Banjarmasin
Jl. Mayjend Soetoyo S No.126 Banjarmasin
Email: idamentayani@yahoo.co.id

ABSTRACT

This aimed of this research is to provide empirical evidence about influence of the General Allocation Fund (DAU), Local Own Revenue (PAD), Financing Surplus Budget (SiLPA) on the Capital Expenditure districts/cities in Island Borneo. The sample used in this study were 46 districts/cities in Island Borneo taken from the Report of Actual Income and Expenditure Budget (budget) from the years of 2010-2012. Analysis tool used in this study is multiple linier regression with a t-test, f-test, and test the coefficient of determination.

The results of this research indicate that partial General Allocation Fund (DAU) Local Own Revenue (PAD) had no significant influence on the Capital Expenditure. Meanwhile, Financing Surplus Budget (SiLPA) has significant influence on the Capital Expenditure. Simultaneously the General Allocation Fund (DAU), Local Own Revenue (PAD), Financing Surplus Budget (SiLPA) significant influence on the Capital Expenditure districts/cities in Island Borneo.

Keywords: *General Allocation Fund, Local Own Revenue, Financing Surplus Budget Capital Expenditure.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penggalan dan pengembangan potensi daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah sendiri.

Pemerintah daerah (pemda) menggali potensi daerah dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan

daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dalam jumlah besar, juga harus diikuti akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah dan dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Setiap daerah memiliki tingkat kemandirian daerah dan kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan. Transfer dana dari pusat ini diharapkan agar pemda lebih optimal mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Jumlah DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Kemudian, dari 25% tersebut dibagi menjadi 90% untuk DAU bagi daerah Kabupaten/Kota dan 10% untuk DAU bagi daerah propinsi. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa DAU berperan sebagai transfer yang bersifat *block grants*. Salah satu peran dari DAU adalah untuk pemerataan horizontal (*horizontal equalization*) yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada di antara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Kebutuhan DAU suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi penerimaan daerah.

Dalam upaya membiayai kegiatan-kegiatan daerah, pemda memanfaatkan PAD, transfer dari pusat berupa DAU dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pemda kota/kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target pemda dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat.

Mekanisme penggunaan SiLPA masih pro dan kontra. SiLPA digunakan pula untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislatif. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SiLPA digunakan belanja langsung berupa belanja modal

yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya yang di dalamnya juga terdapat belanja tidak langsung lebih kecil dari jumlah belanja tidak langsung (Ardhini, 2011).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh Terhadap Belanja Modal (Adiwiyana, 2011, dan Permana, 2013). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh Terhadap Belanja Modal ditemukan oleh Putro (2011), DAU yang tidak berpengaruh terhadap belanja modal oleh Kusnandar (2012), dan Menez (2013). Sementara itu SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Demikian juga dengan hasil penelitian Kusnandar (2012) dan Menez (2013).

Berdasarkan latar belakang penelitian dan hasil penelitian terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti

empiris mengenai pengaruh DAU, PAD dan SiLPA terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terutama pada daerah penelitian yaitu pulau Kalimantan yang merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan sumber kekayaan alam yang melimpah, tetapi pembangunan infrastruktur masih tertinggal dibandingkan pulau Jawa. Luas wilayah, hasil kekayaan alam dan pembangunan infrastruktur dapat dideskripsikan dengan variabel penelitian yang diajukan yaitu dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan belanja modal.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Dana Alokasi Umum

Undang-undang No. 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa DAU berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

Peran DAU adalah untuk pemerataan horizontal (*horizontal equalization*) yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) antara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Kebutuhan DAU suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi penerimaan daerah.

Kebutuhan daerah dihitung dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks harga bangunan dan jumlah penduduk miskin. Potensi penerimaan daerah dapat diketahui dengan memperhatikan variabel potensi PDRB sektor sumber daya alam (primer), PDRB sektor industri dan jasa lainnya (non primer), dan besarnya angkatan kerja.

Pendapatan Asli Daerah

Halim (2002), mengatakan bahwa PAD merupakan semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri;

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 1. Hasil pajak daerah, terdiri: jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.
 2. Hasil retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga jenis golongan retribusi daerah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini adalah deviden yang diperoleh BUMD yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah.
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Termasuk pendapatan ini adalah pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atau kerugian/ kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya dan lain-lain.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA menurut PP No 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemda kota/kabupaten. SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang terdiri realisasi penerimaan PAD, realisasi penerimaan dana, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasi penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemda mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.

Alokasi belanja modal tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemda sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya. Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan kemandirian daerah. Semakin banyak DAU yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, begitu juga sebaliknya.

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006, dalam Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Di samping itu pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Penelitian tentang pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan simpulan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal yaitu Adiwiyana (2011, Putro

(2011) dan Permana, (2013). Hipotesis yang diajukan penelitian ini adalah

Ha 1 : DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota/Kabupaten Kalimantan

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. Daerah yang berpotensi besar karena kekayaan alamnya dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan simpulan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal yaitu Adiwiyana (2011), dan Permana (2013). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

Ha 2 : PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Kalimantan

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Dibandingkan rencana anggaran yang disahkan pada awal tahun (APBD-M), SiLPA lebih disebabkan oleh kegagalan dalam merealisasikan belanja dibandingkan keberhasilan realisasi pendapatan. Hasil penelitian oleh Tim Seknas Fitra (2010) bahwa rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota mencapai 104-105% APBD-M dan 99%-101% APBD-P/Perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi rencana pendapatan yang masih relatif terlalu rendah (*underestimate*). Sementara itu, rata-rata realisasi belanja kabupaten/kota terus meningkat dari 95% (terhadap APBD-M) atau 88% (terhadap APBD-P) pada tahun 2007 menjadi 98% APBD-M atau 92% APBD-P tahun 2009. Hal ini mengindikasikan perencanaan belanja yang terlalu berlebihan, terutama saat APBD-P. Lebih besarnya deviasi realisasi belanja dengan 100% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan menunjukkan bahwa SiLPA lebih diakibatkan oleh belanja.

Selisih lebih pembiayaan negara berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011), Kusnandar (2012) dan Menez (2013). SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008). Namun menurut Kumorotomo (2010), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran.

Ha 3 : SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ada Kota/Kabupaten Kalimantan

Ha 4 : DAU, PAD dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Kalimantan

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Berdasarkan tipenya, penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif yang bertujuan mendapatkan penjelasan mengenai hubungan (kausalitas) antar variabel, melalui pengujian hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis.

Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah semua kota/kabupaten di Pulau Kalimantan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kota dan kabupaten yang melaporkan secara rutin APBD tahun anggaran 2010-2012 dan mempublikasikan PAD, SiLPA, dan DAU dan Belanja Modal.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini berupa data sekunder yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal (BM) yang terdapat pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Pulau Kalimantan yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.go.id).

Metode Analisis Data

Metode (teknik) yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis penelitian ini adalah model regresi linier berganda (*multiple linier regression model*) dengan bantuan program SPSS versi 16,0. Adapun bentuk persamaan model regresi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_1$$

Ket:

Y = Belanja Modal

β_0 = Intercep (Titik potong antar garis regresi)

β_1 - β_4 = Koefisien regresi dan estimator dari parameter

X_1	=	Dana Alokasi Umum
X_2	=	Pendapatan Asli Daerah
X_3	=	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
ϵ	=	Variabel pengganggu

Sebelum pengujian data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, seperti multikolinieritas, otokorelasi dan heteroskedastisitas. Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*ordinary least squares method*) adalah merupakan model regresi yang menghasilkan penduga regresi linier tidak bias yang terbaik. Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi ketiga asumsi tersebut. Selain dilakukan uji asumsi regresi berganda, juga dilakukan uji normalitas, yaitu untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen di dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal.

Pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga dilakukan dengan uji t. Uji t dilakukan dengan membandingkan *P-value* dan t-hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi di atas dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa di atas yaitu *p-value* t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak.

Untuk menguji hipotesis keempat, dilakukan Uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan *p-value* dengan f-hitung yang dihasilkan dari model regresi tersebut dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa di atas adalah jika *p-value* f hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh kota/kabupaten di Pulau Kalimantan yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 buah kota dan 12 buah kabupaten, Provinsi Kalimantan Tengah 1 buah kota dan

13 buah kabupaten, Kalimantan Selatan 2 buah kota dan 11 buah kabupaten serta Kalimantan Timur terdiri dari 4 buah kota dan 10 buah Kabupaten.

Berdasarkan kriteria sampel, maka ada beberapa kota/kabupaten yang dikeluarkan dari sampel yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Sekadau, Kota Bontang, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Tanah Tidung. Kota dan Kabupaten yang menjadi sampel terakhir dan diproses dalam penelitian adalah 46 buah, terdiri dari 7 buah kota dan 39 kabupaten di Pulau Kalimantan. Data penelitian diperoleh dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.go.id).

Tabel 1
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
BM	2.5454E5	2.18883E5	46
DAU	2.9111E5	1.39846E5	46
PAD	5.9185E4	1.42180E5	46
SILPA	1.4756E5	2.22563E5	46

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan data Tabel 1 di atas, nampak bahwa dari 46 buah kabupaten/kota di pulau Kalimantan, rata-rata (*mean*) belanja modal menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata belanja modal yang mengindikasikan hasil yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut relatif rendah dari nilai rata-ratanya, demikian pula dengan DAU dan PAD. Berbeda dengan SiLPA dimana nilai standar deviasi nilainya lebih tinggi dari pada rata-rata yang menunjukkan penyebaran data yang kurang baik.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda untuk menentukan pengaruh

dari tiap variabel yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. Pengujian pengaruh tersebut dilakukan dengan uji hipotesis yaitu uji F dan uji t dengan bantuan program SPSS versi 16.0.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Sig.
Konstanta	285191.005	3.806	.000
DAU	-.389	-1.941	.059
PAD	-.136	-.787	.436
EPS SiLPA	.614	4.851	.000

Multiple R = 0,762
F hitung = 19,441
R Square = 0,581
Sig. F = 0,000
Adjusted R Square = 0,551
n = 46

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Besarnya *Multiple Regression* (R) = 0,762 menunjukkan bahwa DAU, PAD dan SiLPA mempunyai hubungan yang kuat dengan Belanja Modal. Hasil ini sesuai pendapat Sugiyono (2008: 231) bahwa jika koefisien korelasi (*multiple regression*) antara 0,60-7,99, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat.
- Besarnya koefisien determinasi (R^2) = 0,581 merupakan hasil dari $R^2 = 0,762^2$. Kareba jumlah variabel independen lebih dari dua, lebih baik digunakan *Adjusted R Square* yaitu 0,551 (lebih kecil dari R Square). Hal ini berarti 55,1% variasi dari belanja modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan dapat dijelaskan oleh DAU, PAD dan SiLPA
- Uji Anova di dapat F_{hitung} sebesar 19,441 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 5% maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi belanja modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan dapat dijelaskan oleh DAU, PAD dan SiLPA atau dapat

dikatakan DAU, PAD dan SiLPA secara bersama-sama (simultan) memengaruhi belanja modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Hasil pengujian secara simultan (uji F) membuktikan bahwa variabel DAU, PAD dan SiLPA secara bersama-sama (simultan) memengaruhi belanja modal pada kota/kabupaten di Pulau Kalimantan dengan tingkat kesalahan 5%. Hal ini ditunjukkan nilai sig.F = 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa DAU, PAD dan SiLPA secara bersama-sama (simultan) memengaruhi belanja modal pada kota/kabupaten di Pulau Kalimantan. Ketiga variabel independen itu mampu menjelaskan perubahan belanja modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan sebesar 55,1%, sedangkan sisanya sebesar 44,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2012) dan Menez (2013).

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai t hitung variabel Dana Alokasi Umum (X_1) adalah sebesar -1.941. Hasil ini lebih kecil jika dibandingkan t_{tabel} sebesar 1,683. Dengan demikian secara parsial Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dengan probabilitas sebesar 0,059 (lebih besar dari 0,05). Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal secara statistik terbukti ditolak.

Menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada merupakan fungsi Dana Alokasi Umum. Distribusi DAU kepada daerah-daerah

yang memiliki kemampuan keuangan relatif besar akan memperoleh DAU lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Meskipun demikian, ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU masih tinggi dalam pembiayaan rumah tangganya.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal kota/kabupaten di Pulau Kalimantan yang disebabkan DAU yang diterima oleh sebagian besar kota/kabupaten di Pulau Kalimantan dimanfaatkan untuk Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Hal ini tergambar dari jumlah belanja operasi yang lebih besar dari jumlah dana alokasi umum. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kusnandar (2012) dan Menez (2013), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana (2011), Putro (2012) dan Permana (2013).

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai t hitung variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) adalah sebesar -0,787, hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,683. Dengan demikian secara parsial PAD mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal dengan probabilitas sebesar 0,436 (lebih besar dari 0,05). Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal secara statistik terbukti ditolak.

PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah, selain itu PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat. Sumber PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator

sejauh mana telah dilaksanakan otonomi daerah tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kota/kabupaten di Pulau Kalimantan karena pendapatan asli daerah yang diperoleh belum optimal yang disebabkan keterbatasan kemampuan daerah mengeksplorasi hasil kekayaan alam dengan kemampuan sendiri. Sebagian besar kota/kabupaten di Pulau Kalimantan hanya memanfaatkan pendapatan asli daerah untuk Belanja Operasi daripada belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PAD ditambah jumlah DAU maka totalnya lebih kecil dari jumlah belanja operasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putro (2011), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana (2011), Kusnandar (2012) dan Permana (2013).

c. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai t hitung variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X_3) adalah sebesar 4.851. Hasil ini lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,683. Dengan demikian secara parsial PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan probabilitas sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hasil ini membuktikan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal secara statistik terbukti diterima.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dimanfaatkan oleh kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan untuk belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan asset tetap lainnya.

Dibandingkan dengan rencana anggaran yang disahkan awal tahun (APBD-M) SiLPA lebih disebabkan oleh kegagalan daerah merealisasikan belanja daripada keberhasilan realisasi pendapatan yang melebihi rencana. Rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota mencapai 104-105% APBD-M dan 99%-101% APBD-P/Perubahan. Hal ini menunjukkan estimasi rencana Pendapatan yang masih relatif terlalu rendah (*underestimate*) Sementara itu, rata-rata realisasi belanja kabupaten/kota terus meningkat dari 95% (terhadap APBD-M) atau 88% (terhadap APBD-P) pada tahun 2007 menjadi 98% APBD-M atau 92% APBD-P pada tahun 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan belanja yang terlalu berlebihan, terutama saat APBD-P. Lebih besarnya deviasi realisasi belanja dengan 100% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan menunjukkan bahwa SiLPA lebih diakibatkan oleh belanja (Tim Seknas Fitra, (2010). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ardhini (2011), Kusnandar (2012) dan Menez (2013).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.
2. Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.
3. Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.

4. Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.

Saran

1. Perlunya peningkatan PAD dengan lebih menggali potensi daerah melalui kekayaan alam yang dimiliki Pulau Kalimantan, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat dimanfaatkan untuk belanja modal di samping untuk belanja operasi. Penggunaan DAU yang tepat sasaran diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlu perencanaan yang tepat dalam menyusun anggaran belanja modalnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel luas daerah, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus dan memperpanjang periode pengamatan serta memperluas daerah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Petumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis Tentang Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Litbang NTT*. IV-03.
- Halim, Abdul. 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harianto, David & Adi Priyo Hadi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2010. Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja Dan SiLPA Dalam Alokasi APBD Di Beberapa Daerah. *Konferensi Administrasi Negara ke-3*. Bandung.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Menez, Ulva N. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal untuk. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Permana, Deva Yoga. 2013. Pengaruh Petumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putro, Nugroho S & Pamudji, Sugeng. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana

Alokasi Umum Dengan Belanja Modal di Jawa Barat. 27 Januari 2012. http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196510122001121-IKIN_SOLIKIN/Jurnal_PAD.pdf.

Syaiful. 2006. Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. 4 Maret 2012. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>

Tim Seknas Fitra, 2010. Analisis Anggaran Daerah. Studi Terhadap Anggaran tahun 2007-2010 di 42 Kabupaten dan Kota dan 5 Provinsi Di Indonesia.

www.djpk.go.id.

